

al-Balagh

Jurnal Dakwah dan Komunikasi

al-Balagh

Jurnal Dakwah dan Komunikasi

ISSN: 2527-5704 (P) ISSN: 2527-5682 (E)
Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017

Editorial Team

Editor-In-Chief

Imam Mujahid, IAIN Surakarta

Editorial Board

Kamaruzzaman bin Yusof, Universiti Teknologi Malaysia
Waryono Abdul Ghafur, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Moch. Choirul Arif, UIN Sunan Ampel, Surabaya
Imas Maesaroh, UIN Sunan Ampel, Surabaya
Syakirin Al-Ghazali, IAIN Surakarta
Ahmad Hudaya, IAIN Surakarta
M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Managing Editor

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta
Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta
Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi :

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Phone : +62 271 - 781516
Fax : +62 271 - 782774

Surel : journal.albalagh@gmail.com, journal.albalagh@iain-surakarta.ac.id
Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-balagh>

al-Balagh

Jurnal Dakwah dan Komunikasi

ISSN: 2527-5704 (P) ISSN: 2527-5682 (E)

Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017

Daftar Isi

Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam pada Partai Nasionalis <i>Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani</i>	1 - 24
Dialektika Komunikasi Intrapersonal: Mengkaji Pesona Komunikasi dengan Diri Sendiri <i>Ferry Adhi Dharma</i>	25 - 44
Islam Agama Teror? (Analisis Pembingkai Berita Media Online Kompas.com dalam Kasus Charlie Hebdo) <i>Ismail Fahmi Arrauf Nasution dan Miswari</i>	45 - 62
Realitas Sosial Anak Yatim Di Kota Padang dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat <i>Mardan Mahmuda</i>	63 - 86
Pengembangan Kompetensi Profesi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam <i>Zainul Abbas</i>	87 - 110
Bimbingan dan Konseling dengan Pendekatan <i>Rational Emotive Behavior Therapy</i> untuk Penerima Manfaat <i>Mubamad Abdul Kobar dan Imam Mujabid</i>	111 - 124

NEGOSIASI DAKWAH DAN POLITIK PRAKTIS: MEMBACA ORIENTASI ORGANISASI SAYAP KEAGAMAAN ISLAM PADA PARTAI NASIONALIS

Bayu Mitra A. Kusuma

Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Theresia Octastefani

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstract

Keywords:

da'wah, Islamic religious wing, nationalist party, practical politics

Islam is a da'wah religion which disseminate the truth. But on the other hand, Islam is a political religion that is often used as the basis of ideology and struggling in the democratics era to uphold the constitution. Nowadays, Moslems have various political channels through Islamic political party. But each Islamic party has different interests, although equally portray itself as the da'wah party or Indonesian Moslem political place. In this dynamics, political behavior by using da'wah symbols and labeling are also performed by the parties with nationalist genealogy, like Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan, Partai Golongan Karya, and Partai Demokrat, through the Islamic religious organization. One of some actual cases that we can make it referral is the DKI Jakarta governor election. That phenomenon is an authentic evidence that the negotiation between da'wah and practical politics was happened. To analyze the phenomenon, this research used qualitative study, descriptive approach, and interactive data analysis methods by Miles and Huberman. The result of research showed that the da'wah agendas which organized tends to be incidental to adjust with the political constellation that they face and optimized toward of key moments in the political calendar like regional head election. It can be concluded that the orientation of Islamic religious organization which use genealogy nationalist of political party are the doer of the political da'wah rather than politics of da'wah itself. So that, in the negotiations between da'wah and politics practical, the political aspect is more advantaged than the aspect of da'wah.



DOI Number

10.22515/
balagh.v2i1.690

Alamat korespondensi:

e-mail: bayumitraa.kusuma@yahoo.com
theresiaoctastefani@gmail.com

© 2017 IAIN Surakarta
ISSN: 2527-5704 (P) ISSN: 2527-5682 (E)

Abstrak

Kata kunci:

dakwah, sayap keagamaan Islam, partai nasionalis, politik praktis.

Islam adalah agama dakwah yang di dalamnya terdapat usaha untuk menyebarkan kebenarannya. Namun di sisi lain Islam juga merupakan agama politik yang sering kali dipakai sebagai basis ideologi dan perjuangan di era demokrasi yang menjunjung tinggi konstitusi. Saat ini umat Islam memiliki berbagai saluran politik melalui partai politik bercorak Islam. Namun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda meskipun sama-sama mencitrakan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik umat Islam Indonesia. Dalam dinamikanya, perilaku politik dengan menggunakan simbol dan pelabelan dakwah ternyata juga dilakukan oleh partai-partai bergenealogi nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat melalui organisasi sayap keagamaan Islam. Salah satu kasus teraktual yang dapat kita jadikan rujukan adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta. Fenomena tersebut adalah bukti otentik bahwa terjadi negosiasi antara dakwah dan politik praktis. Untuk memperdalam fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan deskriptif, dan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda-agenda dakwah yang diselenggarakan lebih cenderung dilakukan secara insidental menyesuaikan dengan konstelasi politik yang mereka hadapi dan hanya dioptimalkan menjelang saat-saat penting dalam kalender politik seperti pemilu kepala daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orientasi dari sayap keagamaan Islam partai politik bergenealogi nasionalis lebih pada dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah, sehingga dalam negosiasi dakwah dan politik praktis maka aspek politik lebih diuntungkan dibandingkan dengan aspek dakwah.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama dakwah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Muller bahwa yang dimaksud dengan agama dakwah adalah agama yang di dalamnya terdapat usaha menyebarkan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya (Amin 2009, 23). Jika mengacu pada definisi Muller tersebut, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Islam adalah agama dakwah. Di samping itu, berbagai literatur telah menyatakan dengan tegas bahwa dakwah hukumnya adalah *fardlu 'ain* bagi setiap Muslim. Atau dengan kata lain menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah suatu kewajiban yang

harus dijalankan bagi setiap pemeluk agama Islam. Meskipun demikian, di sebagian literatur lainnya juga disebutkan bahwa hukum dakwah adalah *fardlu kifayah*, sehingga apabila dakwah telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang maka kewajiban dakwah bagi Muslim lainnya menjadi gugur. Perbedaan pendapat akan hukum dakwah tersebut terjadi karena penafsiran yang berbeda dari para ulama terhadap Al-Qur'an surat Âli 'Imrân ayat 104. Namun, bagaimanapun juga, keberadaan dakwah begitu vital dalam eksistensi agama Islam, sehingga antara Islam dan dakwah adalah satu tubuh yang tak terpisahkan.

Setiap individu memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda dalam menyampaikan kebenaran Islam. Maka dari itu, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mulai dari dakwah yang dilakukan dengan lisan (*bil lisân*), dengan tulisan (*bil kalâm*), maupun dengan harta benda (*bil hâl*). Terlepas dari caranya yang beragam, tujuan dakwah telah sangat jelas dan terukur yaitu merubah perilaku manusia dan kondisi masyarakat dari pola perilaku yang buruk menjadi lebih baik, dari hidup tanpa tata nilai dan aturan menjadi hidup berlandaskan nilai-nilai Islam yang mulia, dari pola berpikir yang individualis atau mementingkan diri sendiri menjadi hidup berjamaah untuk tolong menolong di dalam kebaikan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi masyarakat masih terus membutuhkan rekayasa sosial agar terlepas dari berbagai penyimpangan seperti kemusyrikan, kefasikan, kebodohan, kerancuan visi, nilai-nilai dan pertimbangan, dan penyimpangan adat istiadat (Munir dan Ilahi 2015, 267-268).

Di sisi lain, Islam merupakan agama politik, antara politik dan Islam seolah-olah menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Tibi 2016, 1). Upaya apapun untuk memisahkan keduanya seakan begitu sulit dilakukan dan bahkan dianggap sebagai suatu langkah untuk mendegradasi agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Islam seringkali dipakai sebagai basis ideologi politik dan basis perjuangan politik (Geovanie 2013, 179), yang kemudian ideologi dan basis perjuangan politik

tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam bentuk partai Islam ataupun partai berbasis massa Islam. Memang di dalam sistem politik modern seperti saat ini upaya mencapai kekuasaan secara formal dan legal adalah melalui partai politik. Karena bagaimanapun juga, partai politik dipandang sebagai institusi resmi di era demokrasi yang menjunjung tinggi konstitusi ini.

Saat ini umat Islam memiliki beberapa saluran politik formal melalui partai politik bercorak Islam yang masih eksis meliputi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Bukan hanya itu, baru-baru ini muncul lagi partai baru yang lebih berani mencantumkan Islam sebagai namanya yaitu Partai Islam Damai Aman (Idaman) besutan Rhoma Irama yang selama ini lebih populer sebagai seniman musik dangdut. Sisi positifnya adalah semakin bertambahnya saluran partisipasi politik bagi umat Islam sebagai penyampai aspirasi atau mobilisasi politik vertikal. Adapun sisi negatifnya adalah semakin banyak saluran politik umat Islam juga mengakibatkan aspirasi politik umat Islam menjadi terpecah-pecah dan tidak terfokus. Padahal jika partai-partai tersebut bersatu, maka estimasi kekuatan yang dapat dihimpun berdasarkan pemilu 2014 adalah sekitar 30% (Jawa Pos 31 Maret 2017, 2). Namun, faktanya masing-masing memiliki kepentingan tertentu meskipun partai-partai tersebut secara tersurat maupun tersirat sama-sama telah mencitrakan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik bagi umat Islam Indonesia.

Dalam dinamika politik yang penuh dengan kepentingan tersebut, perilaku politik dengan menggunakan simbol dan pelabelan dakwah tidak hanya dilakukan oleh partai Islam ataupun partai berbasis massa Islam. Catatan politik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan aktivitas dakwah dalam kontestasi politik juga dilakukan oleh partai-partai yang lebih identik dengan genealogi nasionalis melalui organisasi sayap keagamaan Islam. Padahal, dalam dinamikanya partai nasionalis ini kerap

dipertentangkan dengan partai Islam. Bila partai Islam berkecenderungan meletakkan dasar agama dalam argumen bernegara, sebaliknya partai nasionalis dalam batas-batas tertentu berusaha mensekulerkan negara (Pamungkas 2012, 121). Akan tetapi, dalam realitanya kecenderungan tersebut dapat menjadi bias saat harus berbenturan dengan kepentingan menarik dukungan umat. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Partai Demorat (PD) dengan Ikhwanul Muballighin, dan Partai Golongan Karya (Golkar) bahkan memiliki beberapa sayap keagamaan Islam meliputi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Satuan Karya Ulama, dan Pengajian Al-Hidayah. Maraknya kehadiran organisasi sayap keagamaan Islam pada partai bergenealogi nasionalis menggambarkan bahwa aktivitas dakwah adalah salah satu cara yang dipandang efektif untuk menarik simpati. Atau dengan kata lain, di Indonesia simbol dan konsep Islam begitu atraktif dalam kontestasi politik (Ricklefs 2012, 275).

Salah satu contoh kasus teraktual yang dapat kita saksikan adalah pada konstelasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Pilgub DKI Jakarta kali ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemilu kepala daerah yang paling panas dan gaduh. Disamping munculnya tokoh-tokoh populer dalam kontestasinya, adanya bumbu sentimen suku, ras, ataupun agama tak pelak membuat sayap keagamaan Islam menjadi salah satu organisasi yang paling sibuk dalam upaya pemenangan kandidat. Besarnya peranan sayap keagamaan Islam pada partai bergenealogi nasionalis merupakan bukti otentik bahwa terjadi negosiasi antara dakwah dan politik praktis. Keduanya memiliki relasi dekat, saling berkelindan, dan bersimbiosis dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Karena itu, negosiasi antara dakwah dan politik praktis menarik untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis eksistensi sayap keagamaan Islam pada partai-partai bergenealogi nasionalis tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah arah eksistensi sayap keagamaan Islam pada partai nasionalis meliputi

Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI – P), Partai Golkar, dan Partai Demokrat (PD)?

Ketiga partai tersebut dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, ketiga partai tersebut secara silih berganti memenangkan pemilihan umum di Indonesia dan banyak memenangkan pilkada di berbagai daerah. *Kedua*, dalam konteks pilgub DKI Jakarta, ketiga partai tersebut memiliki andil besar dalam menciptakan peta persaingan. *Ketiga*, partai-partai tersebut memiliki basis massa yang fanatik dan mengakar mulai dari perkotaan sampai pedesaan. *Keempat*, partai-partai tersebut dinilai sukses dalam menarik dan memobilisasi umat Islam melalui sayap keagamaan Islam yang mereka miliki. Terlebih khusus PD bila dibandingkan dengan PDI-P dan Golkar masih tergolong partai muda dalam kontestasi politik Indonesia namun telah mampu menorehkan berbagai catatan keberhasilan.

II. METODE PENELITIAN

Fenomena tersebut didalami dengan metode kualitatif untuk dapat memahami makna dimensi motif dalam serangkaian peristiwa yang membentuk negosiasi dakwah dan politik praktis melalui sayap keagamaan Islam pada tiga partai bergenealogi nasionalis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara detail realitas sosial yang begitu kompleks sehingga relevansi sosiologis dan politisnya dapat dipahami secara mendalam (Layder 1998, 30). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menekankan pada studi literatur. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode interaktif yang terdiri dari empat tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1998, 12).

III. POLITIK DAKWAH VS DAKWAH POLITIK

Pembahasan mengenai dialektika ataupun negosiasi dakwah dan politik praktis memang selalu menarik untuk terus dikaji. Misalnya

penelitian dari Krismono (2015, t.n) yang dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul *Ekonomi Politik Salafisme di Pedesaan Jawa* yang menjelaskan bagaimana dakwah dan politik dapat berjejaring dan bernegosiasi untuk membawa perubahan sosial dan ekonomi sebuah desa di Pegunungan Dieng Jawa Tengah. Begitu pula dalam buku berjudul *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial* karya Abdur Rozaki (2016, t.n) yang mendeskripsikan bahwa untuk mencapai kekuasaan politik, seorang elit memanfaatkan jawara (blater) dan juga tokoh-tokoh Islam atau pelaku dakwah di Madura Jawa Timur.

Namun demikian, penelitian tentang negosiasi dakwah dan politik yang mengkaitkan langsung dengan sayap keagamaan Islam partai politik bergenealogi nasionalis di Indonesia belum begitu banyak dijumpai. Salah satu penelitian yang dapat dihipunkan oleh peneliti adalah karya Ahmad Asroni *et al* (2013, 47 – 48) yang berjudul *Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Sayap Islam Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*. Dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa di Yogyakarta dakwah yang dilakukan oleh dua sayap Islam parpol dari PDI-P dan Golkar dilakukan dengan setengah hati pada saat mendekati pemilihan umum saja. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sayap Islam ini hanya untuk pencitraan dan meraih simpati umat Islam Yogyakarta. Karya sejenis yang juga sangat menarik adalah artikel berjudul *The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam* dari Hilman Latief (2013, t.n) yang menyimpulkan bahwa negosiasi dakwah dan politik dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan amal atau *social charity*. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh partai Islam tapi juga partai-partai lainnya melalui sayap keagamaan Islam partai politik sebagai upaya menarik simpati konstituen. Namun, pada saat yang bersamaan perilaku tersebut justru memperlemah perspektif Muslim mengenai pembangunan dan transformasi sosial.

Adapun bila dibandingkan dengan penelitian Asroni *et al* (2013, 47 – 48) dan Latief (2013, t.n) tersebut, penelitian ini lebih memposisikan diri

untuk mengkomparasikan arah eksistensi sayap keagamaan Islam pada tiga partai bergenealogi nasionalis meliputi PDI-P, Golkar, dan PD melalui isu-isu kontemporer teraktual hingga tahun 2017 secara general di Indonesia, meskipun tidak dapat dipungkiri dalam kajian ini banyak membahas tentang pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai contoh aktual. Hal ini karena DKI Jakarta dipandang sebagai miniatur Indonesia dan memenangkan kontestasi pilgub DKI Jakarta dapat menjadi salah satu akses untuk mengikuti pemilihan presiden di masa mendatang. Berdasarkan pengkajian tersebut nantinya akan diketahui orientasi dari eksistensi tersebut secara lebih luas, antara berdakwah melalui jalur politik atau berpolitik melalui aktivitas dakwah, apakah aspek dakwah dan politik diuntungkan secara berimbang ataukah menguntungkan salah satu aspek saja.

Bila kita *flashback* sekitar dua dekade ini, tepatnya pasca runtuhnya rezim orde baru, Islam muncul sebagai kekuatan yang mampu bersuara secara cukup signifikan setelah sekian lama hanya bisa melihat konstelasi politik dari pinggiran kekuasaan pemerintah. Posisi Islam yang selama orde baru untuk sebagian dipaksa bergerilya di bawah permukaan karena distigmatisasi sebagai ekstrimis maupun fundamentalis kini menemukan ruang legalnya untuk menjadi pelaku politik utama (Lay 2006, 212). Tetapi, rupanya kran demokrasi yang telah terbuka lebar tersebut belum mampu dimanfaatkan oleh partai-partai Islam untuk meraup target maksimal. Dalam hal ini, Islam politik tidak pernah benar-benar menjadi kekuatan masyarakat yang masif apalagi menguasai negara dalam waktu yang lama (Hadiz 2016, 3). Di Indonesia, suara dari umat Islam justru banyak diraih oleh partai-partai bergenealogi nasionalis. Selain memanfaatkan fanatisme yang telah mengakar, salah satu strategi yang diandalkan adalah melalui organisasi sayap keagamaan Islam melalui aktivitas-aktivitas dakwah yang selanjutnya memunculkan istilah politik dakwah dan dakwah politik.

Politik dakwah dapat dipahami sebagai pemanfaatan jalur politik untuk menyampaikan dakwah Islam. Atau dengan kata lain politik dakwah merupakan strategi dalam melaksanakan dakwah lewat politik (Rosa

2014, 70). Memang interpretasi dan implementasi ajaran Islam kerap didasarkan pada kadar intelektual seorang manusia meliputi beberapa hal seperti latar belakang pendidikan, ideologi, ekonomi, budaya, sosial, dan politik dimana memperspektifkan Islam dari sisi politik adalah menyampaikan syiar agama melalui politik praktis (Dermawan 2013, 161). Hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa kekuasaan dan politik tidak selalu negatif. Dalam perspektif Michael Foucault, politik dan kekuasaan lebih dipandang sebagai kebenaran dan berfungsi dalam berbagai bidang kehidupan (Zainal 2014, 39). Politik dan kekuasaan lebih diletakkan pada relasi yang harmoni antara subyek dan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga keagamaan atau lembaga dakwah. Sehingga, berdakwah melalui jalur politik dinilai sebagai suatu kewajaran dan kecerdasan dalam memaksimalkan peluang dakwah. Kekuasaan politik bisa diraih oleh siapa saja dan bagaimana pemanfaatannya tergantung dari karakter pemimpinnya. Jika pemimpin hakiki sebuah masyarakat memegang tampuk manajemen politik, maka ia akan menjalankan “politik ideal” dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan dan mengantarkan umat kepada kesempurnaan (Kheradmardi 2012, 138). Pada akhirnya, dakwah Islam di Indonesia akan tetap pada koridor yang benar meski dilakukan melalui jalur politik praktis yang penuh dengan ketidakpastian.

Sebaliknya, dakwah politik dapat dipahami sebagai upaya memanfaatkan daya tarik aktivitas dakwah untuk meraih kepentingan politik. Atau dapat dikatakan bahwa dakwah politik merupakan ajakan untuk tujuan politik (Rosa 2014, 70). Harus diakui memang seringkali muncul masalah saat Islam disalahgunakan untuk kepentingan politik. Saat Islam dibawa ke ranah politik praktis, maka akan memunculkan politisasi terhadap dakwah. Perebutan kekuasaan yang semestinya diselesaikan di dalam lingkup politik, pada kenyataannya turut menyeret Islam dalam pusaran konflik kepentingan elit. Pada dasarnya fenomena ini telah jamak ditemukan di belahan bumi manapun, bukan hanya di Indonesia

saja. Dalam hal ini, agama kerap menjadi kendaraan politik, ditunggangi oleh orang atau kelompok tertentu dalam upaya meraih puncak syahwat politik. Melalui aktivitas-aktivitas dakwah, cara pandang dan pemikiran masyarakat di akar rumput diarahkan untuk sejalan dengan kepentingan politisi. Proses seperti ini jika meminjam istilah Antonio Gramsci lekat dengan upaya hegemoni. Menurut Gramsci, akibat proses hegemoni akan sangat mempengaruhi kehidupan pribadi sosial, moralitas, prinsip keagamaan, dan intelektual mereka yang dihegemoni (Fakih 2004, xix). Dalam hal ini aktivitas dakwah dapat dijadikan sebagai media strategis bagi politisi untuk menghegemoni pemikiran umat atau masyarakat awam terkait pilihan politik.

IV. ORIENTASI SAYAP KEAGAMAAN ISLAM PARPOL BERGENEALOGI NASIONALIS

Manusia memiliki tabiat alami untuk selalu berusaha mencapai berbagai keinginan dan tujuan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, baik secara individu maupun berkelompok (Kusuma 2015, 2). Demikian pula seorang Muslim sebagai manusia pada umumnya. Meskipun sebagian telah dibekali dengan ilmu agama yang cukup, secara naluri tentu juga memiliki keinginan untuk mencapai kekuasaan duniawi. Terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sadar maupun tidak sadar Islamisasi dalam birokrasi dan institusi-institusi politik telah berjalan yang dibuktikan dengan dominasi umat Islam dalam struktur kekuasaan negara. Dalam hal ini menurut Effendy (2009, 247-248) ada Muslim yang memilih jalur politik melalui partai Islam. Di sisi lain, ada Muslim yang memutuskan berafiliasi pada partai yang berkuasa terutama partai nasionalis. Alasan mereka antara lain adalah untuk mengembangkan hubungan politik yang lebih inklusif dan memasukkan misi dakwah dalam berpolitik, yang salah satunya dimanifestasikan ke dalam organisasi sayap keagamaan Islam pada partai bergenealogi nasionalis. Berikut ini adalah penjabaran bagaimana eksistensi sayap keagamaan Islam di PDI-P, Golkar, dan PD beserta analisis untuk melihat arah orientasinya.

Sebagai bahasan yang pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki sayap keagamaan Islam bernama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Bamusi dibentuk dengan semangat revitalisasi dan reaktualisasi dimensi-dimensi pemikiran Islam dan kebangsaan dari Bung Karno. Sebuah upaya penegasan bahwa sejatinya perjuangan nasionalisme PDI-P adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan umat Islam di Indonesia secara lebih luas. Jika melihat aktivitas Bamusi, maka agenda teraktual yang dilakukan adalah pelatihan mubaligh kebangsaan pada 31 Oktober 2016 yang diselenggarakan di kantor DPP PDI-P Jakarta dengan tema “Meneguhkan Islam Rahmah: Islam Nusantara Berkemajuan untuk Indonesia Raya” (Jawa Pos 1 November 2016, 2). Kegiatan ini secara konsep ditujukan untuk mendukung program dakwah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagaimana amanat dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Bamusi yang pertama di Jakarta Selatan pada tanggal 27-29 Februari 2016 (Qodir, 2016). Memang, saat ini frasa Islam Nusantara sangat kental dengan dakwah NU khususnya sejak Muktamar Jombang 2015 dan Islam berkemajuan identik dengan garis perjuangan Muhammadiyah hasil Muktamar Makassar 2015. Melalui agenda ini, Bamusi seolah berupaya memosisikan diri berada di tengah untuk menyatukan ide besar dari keduanya atau di belakang untuk mendorong keduanya tanpa mengutamakan salah satunya. Pelatihan ini dilakukan secara bergelombang dengan peserta non kader PDI-P sejumlah 120 orang. Para peserta berasal dari ormas-ormas Islam yang dilatih untuk menjadi pendakwah yang memiliki kesadaran mensyiarkan Islam yang cinta tanah air, dimana cinta tanah air sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Harus diakui memang hal ini dapat dikatakan belum dipahami oleh sebagian umat Islam. Dibuktikan dengan munculnya kelompok Muslim fundamental. Melalui pelatihan tersebut ingin dimunculkan citra bahwa PDI-P rela memberikan akses politiknya untuk dimanfaatkan sebagai media dakwah.

Bila benar-benar dilaksanakan dengan baik dan konsisten dari tingkat elit sampai akar rumput, konsep agenda Bamusi tersebut sangat

bagus karena memiliki inti nasionalisme atau semangat kebangsaan yang dipadukan dengan nilai-nilai religiositas. Melalui agenda-agenda ini, Bamusi berupaya mencitrakan diri bukan hanya terkait kepentingan politik praktis, namun juga menggunakan kegiatan dakwah demi menjaga keutuhan negara yang terancam oleh pemahaman agama Islam yang melenceng. Namun apakah benar agenda pelatihan mubaligh atau pendakwah ini benar-benar diselenggarakan Bamusi tanpa adanya kaitan dengan agenda politik? Sulit sekali melepaskan agenda tersebut dengan kepentingan politik praktis karena disebabkan beberapa hal. *Pertama*, agenda tersebut dilaksanakan di saat masa krusial menjelang pemilihan umum gubernur DKI Jakarta. Perlu diingat bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta menetapkan bahwa 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 adalah masa kampanye sehingga pada masa ini semua kandidat dan partai pengusung tentu berlomba-lomba menarik perhatian dan dukungan masyarakat DKI Jakarta. *Kedua*, agenda tersebut dipandang sebagai upaya PDI-P untuk menyelamatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur yang mereka usung dari perkara sensitif yang membelitnya. Perlu diingat pula bahwa dalam kontestasi pilgub DKI Jakarta Ahok berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan kader PDI-P.

Perkara sensitif yang dimaksud adalah terkait dengan pidato Ahok di Pulau Pramuka - Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang banyak memicu kecaman dari berbagai pihak karena dianggap melecehkan Al-Qur'an. Dalam pidato kontroversial tersebut Ahok sempat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Meskipun Ahok telah membantah adanya tendensi untuk menistakan Al-Qur'an dalam pidatonya, tapi mau tidak mau masalah ini terus menjadi bola panas yang menuai protes dari berbagai kelompok (The Jakarta Post 2016, 6). Terlepas dari salah atau tidaknya Ahok dalam perkara yang saat penelitian ini dilakukan masih dalam tahap persidangan, kejadian tersebut tentu berpengaruh pada elektabilitas Ahok dan kredibilitas PDI-P sebagai partai pengusung utama.

Selepas kejadian tersebut banyak sekali serangan bernuansa suku, ras, dan agama yang mengarah kepada Ahok. PDI-P tentu merasa perlu menangkal serangan-serangan tersebut dan pelatihan pendakwah dengan konten “nasionalisme” dipandang sebagai langkah strategis. Dengan mengadakan pelatihan dakwah, maka citra yang akan didapatkan PDI-P melalui Bamusi adalah bahwa PDI-P merupakan partai yang peduli dengan dakwah Islam sehingga akan mengurangi tekanan kepada mereka terkait pencalonan Ahok. Namun sayangnya tidak dapat dihindari adanya pandangan bahwa agenda pelatihan mubaligh tersebut justru mengindikasikan bahwa aktivitas dakwah telah digunakan PDI-P untuk mencapai kepentingan politik seiring meningkatnya konstelasi politik pada pilgub DKI Jakarta.

Indikasi tersebut semakin kuat tatkala Bamusi menyelenggarakan kegiatan pengajian bertema kebangsaan di Cakung Jakarta Timur pada 25 Maret 2017 (Burhani 2017). Agenda ini dalam tataran konsep dimaksudkan sebagai media untuk menebarkan toleransi dan keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengajian tersebut disebutkan bahwa umat Islam Indonesia harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini karena Islam adalah entitas terbesar umat Indonesia sehingga umat Islam Indonesia harus menjadi penjaga pilar utama kerukunan. Akan tetapi, agenda tersebut menjadi kental dengan aroma politik pilgub karena dalam prosesi acara terdapat materi tentang mempertajam program-program kerja Basuki-Djarot (Badja) yang selama ini oleh PDI-P dicitrakan pro umat Islam. Program-program tersebut seperti perhatian pembangunan tempat ibadah umat Islam seperti masjid raya di setiap wilayah Kota Administrasi di DKI Jakarta, meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustadz dan ustadzah serta marbot masjid di wilayah DKI dengan memberikan tunjangan bulanan, melanjutkan program umroh buat marbot masjid, dan lain sebagainya (Lintas Parlemen 2017). Program-program yang dipaparkan tersebut memang benar adanya, namun muatan politik dalam pengajian tersebut seolah menjadi momen untuk menggiring opini publik Jakarta agar mendukung pasangan Badja dalam pilgub DKI

Jakarta khususnya di putaran kedua. Fokus utama dari materi pengajian bukan lagi pada nilai dakwah, tapi pada pemaparan program dan janji politik kandidat yang dikemas secara Islami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas dakwah Islam melalui pengajian kebangsaan tersebut lebih dimanfaatkan untuk menyampaikan misi politik PDI-P untuk memenangkan pasangan “Badja” dalam pilgub DKI Jakarta. Apabila kita komparasikan dengan kota-kota lain pun tidak jauh berbeda. Misalnya di Yogyakarta, agenda-agenda yang diselenggarakan oleh Bamusi cenderung dilakukan insidental, kurang terencana, minim anggaran, kurang adanya kontrol dan evaluasi, dan hanya diutamakan menjelang saat-saat penting dalam kalender politik seperti menjelang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah (Asroni *et al.* 2013, 47-48). Dengan demikian, semakin jelas bahwa orientasi atau arah dari eksistensi Bamusi lebih pada dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah. Atau dengan kata lain, dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis yang terjadi di Bamusi lebih menguntungkan aspek politik dibandingkan dengan aspek dakwah.

Adapun bahasan kedua adalah Partai Golongan Karya (Golkar) yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika Islam dan politik. Partai ini memiliki tiga sayap keagamaan Islam yakni Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) untuk jamaah pria, Pengajian Al-Hidayah untuk jamaah wanita, dan Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama). MDI, Al-Hidayah, dan Satkar Ulama Indonesia didirikan Partai Golkar bersama dengan organisasi sayap Golkar lainnya seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Himpunan Wanita Karya (HWK) pada 24 Mei 1978 dengan persetujuan dari Presiden Soeharto yang sedang berkuasa kala itu. Pada awal terbentuknya organisasi sayap keagamaan Islam ini didirikan untuk mengikat ormas-ormas Islam agar tidak melakukan kegiatan dakwah yang bersifat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Selain itu, pendirian organisasi sayap keagamaan Islam ini dilakukan sebagai sebuah respon Partai Golkar sebagai partai pendukung penguasa

untuk melakukan tindakan preventif terhadap munculnya kelompok Muslim garis keras bahkan memberontak seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia seperti pada zaman pemerintahan Orde Lama. Bagi Partai Golkar, massa umat Islam menjadi salah satu kekuatan potensial untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi pemerintahan. Meskipun peranannya tidak secara signifikan dapat mempengaruhi kebijakan Partai Golkar, setidaknya organisasi sayap keagamaan Islam ini dapat menjadi alat politik Partai Golkar untuk meraup suara umat Muslim di Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa

“Partai Golkar memiliki organisasi sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai”.

Dengan demikian, jika dikontekstualisasikan dengan keberadaan organisasi sayap keagamaan Islam, maka keberadaannya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan strategis di bidang keagamaan dengan semangat nasionalisme dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai Golkar. Pendekatan sayap keagamaan Islam dapat menjadi salah satu elemen kekuatan Partai Golkar untuk memperkuat dan meningkatkan suara pemilih, serta untuk meningkatkan solidaritas dan citra partai politik. Jika ditarik pada kontestasi pilgub DKI Jakarta, sayap keagamaan Islam partai Golkar ini juga turut bergerak untuk menangkal berbagai serangan kepada Ahok yang juga mereka usung. Kasus Ahok tersebut menegaskan adanya hubungan antara agama dan politik yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Kasus penistaan agama ini tidak hanya menjadi pembahasan politik, tetapi juga masuk ke ceramah keagamaan, khutbah Jumat, dan lain sebagainya.

Untuk menghadapi situasi tak menguntungkan tersebut, Partai Golkar melalui sayap keagamaan Islamnya berupaya untuk meredam perdebatan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat sebagai pemegang hak pilih. Misalnya, dengan mengadakan pengajian Golkar dan konsolidasi semua saksi Golkar seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Rabu 29 Maret 2017. Pengajian ini mengambil tema Membumikan Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* (Taufiqurrohman 2017). Pengajian ini adalah salah satu agenda yang mengindikasikan bahwa sayap keagamaan Islam Golkar *all out* dalam bergerak mendapatkan dukungan politik umat Islam. Tujuannya jelas agar “Badja” mampu memenangkan suara dalam pilgub DKI Jakarta. Sayap keagamaan Islam Golkar juga turut mencitrakan bahwa Ahok memiliki keberpihakan terhadap Islam sebagaimana yang juga dilakukan oleh Bamusi. Dalam hal ini, sayap keagamaan Islam pada Partai Golkar menjadi alat politik untuk menghimpun dukungan dari masyarakat Muslim di DKI Jakarta. Sama dengan Bamusi, apabila dikomparasikan dengan kota-kota lain pun tidak akan jauh berbeda. Di Yogyakarta misalnya, agenda dakwah sayap keagamaan Islam Partai Golkar juga cenderung dilakukan secara insidental dan hanya dioptimalkan menjelang saat-saat penting dalam kalender politik saja (Asroni *et al.* 2013, 48). Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orientasi atau arah dari eksistensi dari MDI, Al-Hidayah, dan Satkar Ulama juga lebih bersifat dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah, sehingga dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis yang terjadi di sayap keagamaan Islam Partai Golkar lebih mengutamakan aspek politik dibandingkan dengan aspek dakwah.

Masuk pada bahasan ketiga dalam kajian ini, yaitu sayap keagamaan Islam dari Partai Demokrat (PD). Sebagai partai politik pemenang Pilpres tahun 2004 dan 2009, Partai Demokrat terus memperkuat basis politiknya, salah satunya dengan memperkuat organisasi sayap keagamaan Islam melalui Ikhwanul Muballighin (IM) dan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam”. IM merupakan sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh para

muballigh sejak tahun 2011. Semula ormas ini merupakan pendukung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun ormas ini selanjutnya membuat keputusan politik yang memutar haluan dengan secara resmi menyatakan berafiliasi dengan PD. Dalam menjalankan kegiatan dakwah dan politiknya, IM aktif dalam mengisi kegiatan ceramah subuh, diskusi keagamaan, dan juga pengajian. Sedangkan, Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” merupakan sebuah kelompok pengajian yang dibentuk oleh SBY dan orang-orang terdekatnya pada tahun 2004 untuk mendukung kemenangan SBY dalam Pilpres 2004. Nurussalam sendiri memiliki arti cahaya kedamaian atau cahaya keselamatan. Penamaan ini ternyata dapat mengantarkan SBY menjadi Presiden RI periode 2004 dan 2009. Majelis ini didirikan dan dibina oleh SBY yang notabene akan mencalonkan diri sebagai Presiden RI kala itu. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ada kecenderungan majelis dzikir ini tidak hanya digunakan sebagai sarana dakwah tetapi juga digunakan untuk kegiatan politik. Dalam konteks ini, dzikir dan politik dipahami sebagai sebuah aktivitas yang saling melengkapi, di satu sisi sangat dimungkinkan berdzikir untuk mendukung kegiatan politik, maupun sebaliknya kegiatan politik juga dilakukan untuk berdzikir.

Kolaborasi antara IM dan Majelis Dzikir SBY “Nurussalam” setidaknya mampu menjadikan SBY sebagai presiden RI dua kali periode. Keberadaan organisasi sayap keagamaan Islam ini menjadi semakin penting sebagai penyeimbang, mengingat masa pemerintahan SBY banyak diwarnai dengan kasus-kasus intoleransi yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan keagamaan dan isu hak minoritas (Bush 2015, 254). Sayap keagamaan Islam PD turut mencitrakan bahwa SBY adalah seorang Muslim yang mau menerima perbedaan dan keragaman umat. Tetapi, sayangnya citra yang dibangun rezim SBY melalui PD runtuh ketika terungkap banyaknya anggota partai dan pejabat di kementeriannya tersangkut korupsi. Hal ini tentunya membawa pengaruh negatif pada citra PD pada kontestasi pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Angin segar demokrasi yang ingin dibawa dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui

pasangan calon Agus Yudhoyono-Silvia Murni dengan latar belakang militer-akademisi pun ternyata tidak berhasil membawa kemenangan bagi PD. Padahal, PD dalam mengusung kandidatnya berkoalisi dengan partai-partai berbasis massa Islam seperti PPP, PAN, dan PKB. Yang menarik adalah organisasi sayap ini dalam aktivitas dakwahnya disinyalir ikut memberi dukungan terhadap tokoh-tokoh yang ingin menjatuhkan elektabilitas Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Ada tuduhan dan dugaan bahwa PD terlibat dalam demo aksi 411 dan 212. Benar atau tidaknya keterlibatan mereka pun masih menjadi pembicaraan hangat di tengah suasana Pilgub DKI Jakarta. Meskipun telah didukung oleh partai politik dengan basis massa Islam dan sayap partai Islam ternyata hasil perhitungan suara Agus-Silvi tak mampu mengungguli Ahok-Djarot maupun Anies-Sandiaga untuk maju ke putaran kedua. Kondisi ini dapat dibaca sebagai tersingkirnya PD dalam hajatan demokrasi pilgub DKI Jakarta. Jika melihat pada konstelasi politik tersebut, maka aktivitas sayap keagamaan Islam PD lebih ditujukan sebagai gerakan dakwah politik. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kepentingan politik PD lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dakwah.

Pada akhirnya, keberadaan organisasi sayap keagamaan Islam menjadi media yang sangat strategis bagi partai-partai bergenealogi nasionalis untuk merebut suara pemilih Muslim dan menjadi pesaing bagi partai politik berbasis Islam. Sayap keagamaan Islam sangat diharapkan dapat memberikan dampak politik dalam mendapatkan kekuasaan terlebih ketika disadari bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kiai dan tokoh pesantren juga menjadi basis dukungan yang diharapkan oleh partai politik nasionalis. Semakin banyak kiai dan tokoh pesantren yang menjalin relasi dan tergabung dalam sayap keagamaan Islam maupun partai politik nasionalis, maka pengikut setia kiai dan santrinya akan mengikuti apa yang didakwahrkannya. Dengan begitu, dakwah dapat menjadi alat aktivitas politik keseharian (*daily politics*) dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa urusan

spiritual seringkali dibenturkan urusan duniawi dan menjadi fenomena dalam ruang politik Indonesia. Secara kontekstualnya, partai politik masih sangat mengandalkan kekuatan agama untuk membangun relasi antara partai politik dan masyarakat. Dengan terjalinnya relasi tersebut, sayap keagamaan dalam partai diorientasikan dapat mempengaruhi pemilih Muslim dalam menjatuhkan pilihannya pada partai politik bergenealogi nasionalis tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh partai politik bergenealogi nasionalis untuk memaksimalkan kekuatan politik dari sayap keagamaan Islam.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, Bamusi dibentuk oleh PDI-P dengan semangat revitalisasi dan reaktualisasi pemikiran Islam kebangsaan Bung Karno. Program dakwah yang dilakukan antara lain adalah pelatihan *da'i* untuk menjadi pendakwah yang nasionalis. Konsep Bamusi tersebut sangat bagus namun sulit untuk dilepaskan dari kepentingan politik praktis karena dilaksanakan di saat masa krusial menjelang pilgub DKI Jakarta dan dipandang sebagai upaya PDI-P untuk menyelamatkan Ahok sebagai calon gubernur yang mereka usung dari perkara pidato di Kepulauan Seribu yang banyak memicu kontroversi. Pelatihan *da'i* dengan konten “nasionalisme” juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mempertajam program-program kerja Basuki-Djarot (Badja) yang selama ini oleh PDI-P dicitrakan pro umat Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas dakwah Islam melalui pengajian kebangsaan tersebut lebih dimanfaatkan untuk menyampaikan misi politik PDI-P untuk memenangkan pasangan “Badja” dalam pilgub DKI Jakarta. Bila dikomparasikan dengan kota-kota lain pun agenda-agenda Bamusi cenderung dilakukan insidental, kurang terencana, minim anggaran, dan hanya dioptimalkan menjelang saat-saat krusial dalam kalender politik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa orientasi Bamusi lebih pada dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah. Atau dengan

kata lain dalam negosiasi dakwah dan politik praktis, aspek politik lebih diuntungkan dibandingkan dengan aspek dakwah.

Kedua, MDI, Al-Hidayah, dan Satkar Ulama pada mulanya didirikan untuk mencegah ormas-ormas Islam melakukan kegiatan dakwah yang mengkritisi pemerintah Orde Baru dan tindakan preventif terhadap munculnya kelompok Muslim garis keras seperti DI/TII. Partai Golkar memandang bahwa organisasi sayap Islam penting untuk memperkuat basis dukungan partai. Jika ditarik pada kontestasi pilgub DKI Jakarta, sayap keagamaan Islam partai Golkar ini juga turut bergerak untuk menangkal berbagai serangan kepada Ahok yang juga mereka usung. Partai Golkar melalui sayap keagamaan Islamnya berupaya meredam pro dan kontra Ahok dengan mengadakan pengajian dan konsolidasi saksi dengan tema Membumikan Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*. Pengajian ini mengindikasikan bahwa sayap keagamaan Islam Golkar *all out* dalam bergerak mendapatkan dukungan politik umat Islam. Sayap keagamaan Islam Golkar juga turut mencitrakan bahwa Ahok memiliki keberpihakan terhadap Islam sebagaimana yang juga dilakukan oleh Bamusi. Seperti Bamusi, bila dibandingkan dengan kota-kota lain pun agenda-agenda sayap Islam Golkar cenderung hanya dioptimalkan saat mendekati hajatan politik. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orientasi dari MDI, Al-Hidayah, dan Satkar Ulama juga lebih bersifat dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah. Sehingga dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis, porsi politik lebih diutamakan.

Ketiga, IM merupakan sebuah ormas yang semula merupakan pendukung dari PPP dan berubah haluan afiliasi menjadi pendukung PD. Sedangkan Nurussalam merupakan sebuah kelompok pengajian yang dibentuk oleh SBY pada tahun 2004 untuk mendukung SBY dalam Pilpres 2004. Kolaborasi antara IM dan Nurussalam setidaknya mampu menjadikan SBY sebagai presiden RI dua kali periode. Dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017, IM dan Nurussalam mendukung pasangan calon Agus-Silvi namun tidak berhasil membawa kemenangan meski berkoalisi

dengan partai-partai berbasis massa Islam seperti PPP, PAN, dan PKB. Sama dengan sayap keagamaan Islam PDI-P dan Golkar, sayap keagamaan Islam PD juga lebih beorientasi dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah. Negosiasi antara dakwah dan politik praktis pada sayap keagamaan Islam PD juga lebih mementingkan aspek politik dibandingkan dengan dakwah. Dengan demikian, arah eksistensi sayap keagamaan Islam di PDI-P, Golkar, maupun PD sama-sama lebih berorientasi politik praktis dibandingkan dengan dakwah.

Penting untuk mengoptimalkan fungsi dan peran organisasi sayap keagamaan Islam pada partai nasionalis, sehingga organisasi sayap keagamaan Islam pada partai nasionalis bukan hanya sebatas alat pencitraan dan menarik simpati masyarakat pada hajatan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap tersebut diharapkan mampu mengadakan program yang berkesinambungan dan kontinyu untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar organisasi sayap keagamaan Islam partai nasionalis tidak hanya mengadakan kegiatan untuk memperbaiki citra dan kepentingan pemilihan umum saja, tetapi menelurkan program dan kegiatan yang terus menerus diadakan. Karena jika organisasi sayap keagamaan Islam partai nasionalis hanya mengadakan kegiatan untuk kepentingan pemilihan umum, maka sama halnya dengan mempermainkan masyarakat dan menggunakan agama untuk kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Asroni, Ahmad *et al.* 2013. “Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Sayap Islam Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta”. *Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi XIV*, 1-48.
- Burhani, Ruslan. 2017. *Bamusi Pertajam Program “Badja” yang Pro Umat Islam*. Diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/620339/>

bamusi-pertajam-program-badja-yang-pro-umat-islam pada 31 Maret 2017.

- Bush, Robin. 2015. “Religious Politics and Minority Right during the Yudhoyono Presidency”. Dalam Edward Aspinall *et al.* *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnancy*. Singapura dan Sidney: Institute of Southeast Asian Studies dan the Australian National University.
- Dermawan, Andy. 2013. “Dialektika Dakwah, Politik, dan Gerakan Keagamaan Kontemporer: Telaah Pemikiran Nasir Al-Din Al-Albani dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Salafy Kontemporer”. *Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi* 14, 2: 161.
- Effendy, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fakih, Mansour. 2014. “Gramsci di Indonesia: Pengantar”. Dalam Roger Simon. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Terj. Kamdani dan Imam Bachaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Geovanie, Jeffrie. 2013. *Civil Religion: Dimensi Sosial Politik Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiz, Vedi R. 2016. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jawa Pos. 2017. *Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2014*. Edisi Jumat, 31 Maret 2017: 2.
- Jawa Pos. 2016. *Gerakan Bamusi PDI-P Latih Para Mubaligh: Sebarkan Islam Berkemajuan ke Penjuru Nusantara*. Edisi Selasa, 31 Oktober: 2.
- Kheradmardi, Husain R. 2012. *Manajemen Politik: Perspektif Khajeh Nasirudin*. Jakarta: Sadra International Institute.
- Krismono. 2015. *Ekonomi Politik Salafisme di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Kusuma, Bayu Mitra A. 2015. “Dialectics of Islam, Politics, and Government in Southeast Asian Countries: A Comparison of Indonesia and Thailand”. Dipresentasikan di *6th Joint International Conference and Graduate Workshop on Islamic Studies Revisited in Cooperation with Geörg August Universität Göttingen*. Yogyakarta, 27-30 Oktober.
- Latief, Hilman. 2013. “The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party - based Charitable Organizations in Contemporary

- Indonesian Islam”. *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 51, 2.
- Lay, Cornelis. 2006. *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Program S2 PLOD dan JIP Fisipol UGM.
- Layder, Derek. 1998. *Sociological Practice: Linking Theory and Social Research*. London: Sage Publication.
- Lintas Parlemen. 2017. *Bamusi Pertajam Program Ahok yang Pro Islam*. Diakses melalui <https://www.lintasparlemen.com/bamusi-pertajam-program-ahok-yang-pro-islam/> pada 31 Maret 2017.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael A. 1998. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. London: Sage Publication.
- Munir, Muhammad dan Ilahi, Wahyu. 2015. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Qodir, Abdul. 2016. *Organisasi Sayap PDIP, Baitul Muslimin Indonesia Gelar Mukernas Pertama*. Diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/27/organisasi-sayap-pdip-baitul-muslimin-indonesia-gelar-mukernas-pertama> pada 31 Maret 2016.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2012. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History c. 1930 to the Present*. Singapura: National University of Singapore Press.
- Rosa, Andi. 2014. “Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, 1: 70.
- Rozaki, Abdur. 2016. *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Suka Press.
- Taufiqurrohman. 2017. *Golkar Kerahkan Sayap Keagamaan Menangkan Ahok-Djarot*. Diakses melalui <http://pilkada.liputan6.com/read/2903716/golkar-kerahkan-sayap-keagamaan-menangkan-ahok-djarot> pada 7 April 2017.
- The Jakarta Post. 2016. *Ahok Denies He Insulted the Quran*. Edisi Jumat, 7 Oktober: 6.
- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*. Terj. Alfathri Adlin. Bandung: Mizan.
- Zainal, Asliah. 2014. “Aisyiyah di Muna: Negosiasi Dakwah dan Politik”.

Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi XV, 1: 39.